

KAJIAN IMPLEMENTASI METODE PENGADAAN LANGSUNG UNTUK PROYEK KONSTRUKSI

TUGAS AKHIR

Oleh:



**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2025**

KAJIAN IMPLEMENTASI METODE PENGADAAN LANGSUNG UNTUK PROYEK KONSTRUKSI

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Program Strata-1 pada Departemen Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Andalas



Oleh:

NUR RAHMAH ILLAHI

NIM: 2110922022

Pembimbing:

Ir. BENNY HIDAYAT, S.T., M.T., Ph.D.

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2025**

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa dalam proyek konstruksi merupakan aspek krusial yang menuntut perencanaan serta pengelolaan yang sistematis dan sesuai regulasi. Di lingkungan institusi Lembaga X, proses pengadaan harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu metode yang umum digunakan untuk pekerjaan konstruksi berskala kecil adalah pengadaan langsung, yang secara normatif diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Lembaga x No. y Tahun 2022. Metode ini dipilih karena dianggap mampu mempercepat proses pengadaan serta memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan dengan lingkup terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji implementasi metode pengadaan langsung dalam proyek konstruksi di lingkungan Lembaga X, dengan fokus pada kesesuaian pelaksanaan terhadap regulasi yang berlaku serta identifikasi tantangan yang dihadapi oleh para pelaku pengadaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur yang melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), tim teknis, dan penyedia jasa konstruksi. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengungkap pola pelaksanaan, deviasi terhadap aturan, serta persepsi para pelaku terhadap efektivitas metode pengadaan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadaan langsung menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan dan kemudahan proses, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu temuan utama adalah adanya praktik pelaksanaan pekerjaan sebelum kontrak resmi ditandatangani, yang bertentangan dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pengadaan. Selain itu, proses perencanaan teknis sering kali dilakukan oleh penyedia jasa tanpa keterlibatan konsultan perencana, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Kelebihan dari metode pengadaan langsung antara lain efisiensi waktu, fleksibilitas dalam pelaksanaan, dan kemudahan administrasi. Namun, kelemahan yang teridentifikasi meliputi ketidaksesuaian dokumen pengadaan, potensi miskomunikasi antar pihak, serta rendahnya kompetensi formal dari sebagian penyedia jasa lokal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, penguatan kapasitas teknis penyedia lokal, serta pelibatan konsultan dalam tahap perencanaan untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan proyek konstruksi berskala kecil.

Kata kunci : Pengadaan langsung, Proyek konstruksi, Regulasi, Implementasi

ABSTRACT

The procurement of goods and services in construction projects is a critical aspect that demands systematic planning and management in accordance with applicable regulations. Within the institutional framework of Agency X, procurement processes must adhere to the principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. One commonly used method for small-scale construction work is direct procurement, which is normatively regulated by Presidential Regulation No. 12 of 2021 and technically elaborated in Agency X Regulation No. Y of 2022. This method is chosen for its potential to accelerate procurement processes and provide flexibility in executing projects with limited scope. This study aims to examine the implementation of the direct procurement method in construction projects within Agency X, focusing on regulatory compliance and identifying challenges faced by procurement stakeholders. A qualitative approach was employed through semi-structured interviews involving various relevant parties, including Commitment Making Officials (PPK), Procurement Officers (PP), technical teams, and construction service providers. The collected data were analyzed thematically to reveal implementation patterns, deviations from regulations, and stakeholder perceptions regarding the effectiveness of direct procurement. The findings indicate that although direct procurement offers advantages in terms of speed and procedural simplicity, its field implementation still encounters several obstacles. A key issue identified is the practice of commencing work prior to the official signing of contracts, which contradicts the principles of legality and accountability in procurement. Additionally, technical planning is often conducted by service providers without the involvement of planning consultants, potentially leading to conflicts of interest and reduced quality of project outcomes. The strengths of the direct procurement method include time efficiency, implementation flexibility, and administrative ease. However, identified weaknesses encompass inconsistencies in procurement documentation, potential miscommunication among stakeholders, and the limited formal competence of some local service providers. Based on these findings, the study recommends enhancing compliance with existing regulations, strengthening the technical capacity of local providers, and involving consultants during the planning phase to ensure the quality and accountability of small-scale construction project implementation.

Keywords : Direct procurement, Construction project, Regulation, Implementation

